



RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

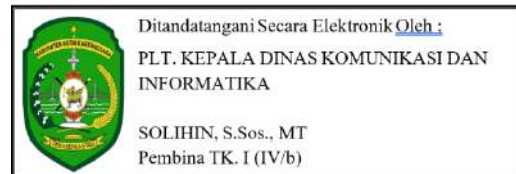
Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2026 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan

motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	28
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.	35
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA PADA TAHUN 2026	41
2.5 PENELAAHAN PROGRAM USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	64
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA..	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	69
BAB V PENUTUP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2024, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2025. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2024 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Target 3 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Target 7 Dokumen Realisasi 7 Dokumen (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 888 Orang/Bulan Realisasi 766 Orang/Bulan (86,26%)

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target 14 Orang Realisasi 14 Orang (100%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target 74 Laporan Realisasi 72 Laporan (97,30%)
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 3 Unit Realisasi 3 Unit (100%)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 25 Unit Realisasi 25 Unit (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target 3 Laporan Realisasi 3 Laporan (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target 22 Unit Realisasi 22 Unit (100%)
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Target 1 Unit Realisasi 1 Unit (100%)
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 16 Unit Realisasi 16 Unit (100%)

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

- d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Target 3 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (100%)
- e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Target 73 Dokumen Realisasi 73 Dokumen (100%)
- f. Pelayanan Informasi Publik Target 5 Dokumen Realisasi 5 Dokumen (100%)
- g. Layanan Hubungan Media Target 254 Layanan Realisasi 254 Layanan (100%)
- h. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Target 100 Dokumen Realisasi 100 Dokumen (100%)
- i. Manajemen Komunikasi Krisis Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
- j. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
- k. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Target 3 Unit Realisasi 3 Unit (100%)
- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Target 1 Unit Realisasi 1 unit (100%)
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Target 10 Dokumen Realisasi 10 Dokumen (100%)

- e. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Target 59 Unit Realisasi 59 Unit (100%)

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Target 4 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (100%)
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Target 114 Orang Realisasi 114 Orang (100%)
- d. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota

Sub Kegiatan :

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Target 114 Orang Realisasi 122 Orang (107,02%)

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

Indikator yang belum tercapai sesuai dengan Target antara lain Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran) yaitu Indeks SPBE dan Indikator Program Penunjang yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, penyebabnya antara lain :

- Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi optimal dimana seharusnya Tim Koordinasi SPBE berfungsi sebagai Tim Pengarah TIK yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE
- belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE Penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek. Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja
- Perbedaan Persepsi Sasaran Desa Blankspot
- Masih kurangnya pemahaman terkait data dukung, masih kurangnya data dukung dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

1) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi kepada masih rendahnya Capaian terhadap Indikator Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indiak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

2) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Mendorong peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya mengintervensi terhadap peningkatan indikator
- Menyelaraskan penganggaran pada aspek Manajemen SPBE dan Audit TIK dengan penerapan dokumen Peta Rencana SPBE. Selain itu perlu segera disusun secara formal pedoman pelaksanaan manajemen dan audit SPBE
- Melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE serta melakukan pengaturan agar penyusunan DPA/RKA perangkat daerah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK
- Pengadaan Jaringan Internet selain Pemerintahan Desa
- Mempelajari Data Dukung serta Memperbaiki arsip dan dokumentasi kegiatan

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	13	3	3	100,00	3	19	86,36
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	51	20	7	7	100,00	10	37	72,55
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4.560	1.826	888	766	86,26	888	3.480	76,32

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	7	4	4	100,00	2	13	76,47
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	75	76	14	14	100,00	10	100	133,33
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	110	76	2	2	100,00	1	79	71,82
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	6	1	1	100,00	1	8	80,00
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	425	221	75	72	96,00	50	343	80,71
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	57	48	1	2	200,00	2	52	91,23
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	7	3	3	100,00	2	12	600,00
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	397	186	25	25	100,00	93	304	326,88
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	6	Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	8	3	3	100,00	4	15	78,95
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	124	57	22	22	100,00	22	101	81,45
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	5	1	1	100,00	3	9	33,33
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	157	150	16	16	100,00	3	169	107,64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	02:01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	10	4	2	2	100,00	1	7	70,00
2	16	2	02:01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	38	32	2	2	100,00	2	36	94,74
2	16	2	02:01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	13	7	2	2	100,00	2	11	84,62
2	16	2	02:01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	35	16	8	8	100,00	3	27	77,14

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	6	Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	0,08402778	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	85	6	3	3	100,00	8	17	20,00
2	16	2	02:01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	25	10	5	5	100,00	5	20	80,00
2	16	2	0,08402778	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	641	310	254	254	100,00	74	638	99,53
2	16	2	02:01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	670	370	100	100	100,00	100	570	85,07
2	16	2	02:01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	16	2	02:01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	600	100	-	-	-	120	220	36,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	6	Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	2	02:01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	2	02:01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	218	12	6	6	100,00	100	118	54,13
2	16	3	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Dokumen	30	3	6	6	100,00	-	9	30,00
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	7	2	3	3	100,00	1	6	85,71
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	9	4	1	1	100,00	2	7	77,78

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	3	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	18	7	2	2	100,00	4	13	72,22
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	40	26	10	11	110,00	10	47	117,50
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	90	66	6	6	100,00	6	78	86,67
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	65	60	1	1	100,00	2	63	96,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	224	83	59	59	100,00	59	201	89,73
2		20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	14	6	4	4	100,00	2	85,71
2		20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	607	265	114	122	107,02	114	82,54
2		20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	16	6	2	2	100,00	4	75,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	20	2	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	462	116	114	114	100,00	116	346	74,89
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	74	36	2	2	100,00	-	38	51,35
2	20	2	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	Dokumen	7	2	1	1	100,00	1	4	57,14
2	21	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	1	-	-	-	1	2	66,67
2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	15	12	1	1	100,00	1	14	93,33
2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	21	2	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Layanan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih dibawah target yang ditetapkan, Peningkatan ini dikarenakan tersedianya Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dokumen Peta Rencana SPBE Nomor 318 /SK-BUP/HK/2023; Tersedia anggaran untuk pengelolaan Infrastruktur TIK dan Pengembangan Aplikasi, Ketersediaan Infrastruktur TIK dan Pemanfaatan Aplikasi Umum/Aplikasi Berbagi Pakai, dan tersedianya Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE			3,00	3,10	3,15	3,22	3,29	2,54	3,09	3,22	3,29	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			3,10	3,15	3,20	3,11	3,16	1,40	2,20	3,11	3,16	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
3	Indeks Domain Layanan SPBE			2,96	3,01	3,06	3,40	3,45	3,51	3,88	3,40	3,45	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,25	3,30	3,35	3,20	3,25	1,00	1,82	3,20	3,25	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													kenaikan dari tahun 2023
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			3,05	3,10	3,15	3,14	3,25	3,30	3,60	3,14	3,25	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	84,00	86,00	88,00	91,00	93,95	68,17	88,00	91,00	Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			10,00	18,97	37,93	75,86	100,00	37,93	56,89	75,86	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21	10	10	16	16	10	10	Capaian sesuai dengan target kinerja
12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	Capaian sesuai dengan target kinerja
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	3	4	4	Capaian sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	5	Capaian sesuai dengan target kinerja
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Capaian sesuai dengan target kinerja
18	Jumlah Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			840	840	840	840	840	840	840	840	840	Capaian sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government			58	58	58	58	58	58	56	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja
21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			58	58	58	58	58	58	58	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			11	11	11	11	14	11	11	11	14	Capaian sesuai dengan target kinerja
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		73,00	75,00	85,00	85,00	73,91	87,50	85,00	85,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70,43	71,22	71,91	71,91	70,43	69,37	71,91	71,91	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			6. Tingkat keamanan informasi pemerintah		55,60	57,80	58,00	58,00	55,60	54,88	58,00	58,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya yang signifikan dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai standar kinerja yang optimal.

Salah satu capaian positif yang patut diapresiasi adalah upaya Diskominfo dalam mengembangkan infrastruktur TIK, seperti perluasan jaringan internet di pedesaan dan penyediaan layanan e-government. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Tim Koordinasi Spbe Belum Berfungsi Optimal Dimana Seharusnya Tim Koordinasi Spbe Berfungsi Sebagai Tim Pengarah Tik Yang Bertugas Untuk Mengendalikan, Mengarahkan, Mengevaluasi Dan Melaksanakan Perumusan Kebijakan Dan Penerapan SPBE
- Belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE
- Penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek.

Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja

- Perbedaan Persepsi Sasaran Desa Blankspot

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	<i>MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;</i>			

1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan 2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah 3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT 4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi 4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			

1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
---	---	---	---	--

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Belum optimalnya pendataan Statistik Sektor

Adapun Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Adanya peluang recruitment SDM IT
- Adanya peluang peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Adanya peluang optimalisasi Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektorial secara komperhensif

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dari penjabaran isu – isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- Perlunya Rekrutmen Tenaga Ahli baik dari IT, Persandian, Statistik, maupun Tenaga Ahli Desain Grafis
- Mendorong peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya mengintervensi terhadap peningkatan indikator kinerja
- Menyelaraskan penganggaran pada aspek Manajemen SPBE dan Audit TIK dengan penerapan dokumen Peta Rencana SPBE. Selain itu perlu segera disusun secara formal pedoman pelaksanaan manajemen dan audit SPBE
- Segera melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE serta melakukan pengaturan agar penyusunan DPA/RKA perangkat daerah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK
- Pengadaan Jaringan Internet selain Pemerintahan Desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2026

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara tahun 2026 pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	15.984.481.540	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,00 Nilai	28.584.422.466	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	500.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggat ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggat ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	
3						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Perangkat Daerah
4						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung
5						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	81 Data	100.000.000	Fasilitasi Pengumpulan Data Sektoral Perangkat Daerah
6						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.006.217.716	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	10.772.522.466	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/Bulan	10.361.230.302	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	411.292.164	Tambahan Honor Pengelola Keuangan (PA,KPA,BP,BPP,PPK SKPD)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	125.000.000	
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	700.000.000	
10						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	700.000.000	Pelatihan ASN 43 Org
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	800.000.000	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (belanja alat tulis kantor, kertas, tinta dll) Bendera, Tisu, Gorden
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Belanja Makan Minum Rapat, Tamu & Natura
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Belanja Cetak Baliho / Spanduk / Banner, Fotocopy - Pengadaan Map Kop dan Kalender

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Luar Daerah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	200.000.000	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	-	
17						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
18						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.005.100.000	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	14.000.000.000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Ahli, Tenaga Tenis OPD, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Iuran jaminan/asuransi, jasa pengelolaan sampah,
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	28 Unit	681.800.000	
2 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	381.800.000	Pemeliharaan kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 dan 4
2 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.605.357.333	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.155.000.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.155.000.000	
27	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	1 Persen	50.000.000	
28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	1.000.000.000	Untuk keperluan operasional outsourcing pengelolaan aplikasi dan agent call center, petugas 24 jam, 3 shift, terdiri dari 6 orang petugas call center

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											selama satu tahun anggaran
29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Diseminasi Informasi	Tenggarong	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2 Persen	100.000.000	
30	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Konten	Kukar	Jumlah Konten Informasi Publik	850 Konten	85.000.000	
31	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	200.000.000	
33	Layanan Hubungan Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	530.357.333	Relasi Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 laporan	100.000.000	
34	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Tenggarong, Ma Badak, Ma Muntai, Loa Janan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan PemangkuKepentingan	200 Dokumen	300.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kukar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Komunitas	200.000.000	
35	Manajemen Komunikasi Krisis	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Kaman	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	
37	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tenggarong	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	70.000.000	
38						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	150.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	20.558.588.170	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	-	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	20.558.588.170	
40	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tenggarong	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Spbe Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Serta Penyusunan Rencana Dan Anggaran Spbe Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	300.000.000	
41	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	Penyediaan Akses Internet	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	56 Perangkat Daerah	12.851.309.328	1. Mengakomodir Usulan Musrenbang 2. Persiapan Program Internet Desa Gratis

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tenggarong	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum Spbe	Tenggarong	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1Aplikasi	75.000.000	
43						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tenggarong, Jakarta	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	50.000.000	
44	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jakarta, Tenggarong	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tenggarong, Jakarta	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	275.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Lamin Telihan, Desa Sepatin, Menamang Kiri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1.265.278.842	-	-	-	-	-	
46	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Yogyakarta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	100.000.000	
47	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Samarinda, Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong, Jakarta, Yogyakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	100.000.000	
48						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	56 Perangkat Daerah	6.807.278.842	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.281.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	1.450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	2.281.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	2.281.000.000	
49	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	750.000.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	150.000.000	
50	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Yogyakarta, Samarinda	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	130 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	170 Orang	300.000.000	
51	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tenggarong	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	450.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Tenggarong	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	1.381.000.000	Kerjasama dengan BPS dalam rangka Pendampingan penyusunan dokumen statistik sektoral daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2.148.650.000)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52					-	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	350.000.000	
53						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tenggarong	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 Persen	100.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				850.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.485.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	850.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	1.485.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	650.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	1.335.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Yogyakarta	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	150.000.000	
55	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	150.000.000	
56	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	56 Perangkat Daerah	985.000.000	Penyusunan Indeks KAMI, Belanja pengadaan Lisensi Antivirus, Lisensi Penetration Testing Keamanan Informasi & Perangkat Scanning Tool Keamanan Informasi

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	50.000.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	150.000.000	
58	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	150.000.000	
	Total				32.923.666.543					55.064.010.636	

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Dusun Malong, Kab. Kutai Kartanegara Kenohan	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini. Dan untuk pembangunan BTS atau Menara Telekomunikasi bukan kewenangan Diskominfo melainkan kewenangan dari ISP (Internet Service Provider)
2	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	DUSUN HANDIL PANGULU RT 03 DESA SANTAN ILIR , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Jl. Mulawarman RT. 03 Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
4	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Masaping RT.12 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
5	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	desa santan ilir, Kab. Kutai Kartanegara Marang Kayu	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
6	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	salo cella RT 001, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
7	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	jln.anyeq apui, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
8	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	RT. 006 dan RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindak lanjuti pada tahun 2026, dengan catatan terdapat penambahan anggaran karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu, diperlukan aset lahan desa dengan ukuran 30 x 30 meter serta ketersediaan listrik PLN yang beroperasi 24 jam untuk mendukung pembangunan Tower Repeater.
9	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Dusun Mekar Sari RT.005 dan RT.006, Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
10	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Desa Liang Buaya, Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
11	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	BELAKANG KANTOR DESA JANTUR SELATAN, JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 , Kab. Kutai Kartanegara Muara Muntai	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
12	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Desa Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara Muara Wis	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
13	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Jalan Gerbang Dayaku, Jalan Kejawi, Jalan Amelia 1,2 & 3, jalan Pisang, Jalan Durian, jalan Jeruk, Jalan Rambutan , Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
14	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Bukit Jaya KM.27 RT.006, Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
15	Penyediaan Akses Internet / Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Pedesaan	Bensamar RT.009, Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	Jumlah Unit Perangkat Jaringan Internet	1 Unit	Prioritas Catatan : Usulan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi penyediaan jaringan internet yang paling sesuai, baik melalui fiber optik, perangkat Starlink, atau pembangunan Tower Repeater. Pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan pada Tahun 2026, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika (Kominfo) perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Berikut adalah analisis mendalam terhadap beberapa kebijakan nasional Kominfo yang relevan:

1. Kebijakan Transformasi Digital

- **Tujuan:** Mendorong percepatan transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan sosial.
- **Implementasi:**
 - Pengembangan infrastruktur digital, seperti jaringan internet cepat (Palapa Ring) dan satelit multifungsi SATRIA-1.
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
- **Tantangan:**
 - Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.
 - Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah terpencil.
- **Peluang:**
 - Peningkatan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - Kolaborasi dengan swasta dan lembaga internasional untuk mempercepat transformasi digital.

2. Kebijakan Literasi Digital

- **Tujuan:** Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan produktif.
- **Implementasi:**

- Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang mencakup empat pilar: digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.
- Pelatihan dan workshop literasi digital di berbagai daerah.
- **Tantangan:**
 - Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat pedesaan.
 - Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menjangkau seluruh wilayah.
- **Peluang:**
 - Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan materi literasi secara masif.
 - Kolaborasi dengan komunitas lokal dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan program.

3. Kebijakan Keamanan Siber

- **Tujuan:** Melindungi data dan sistem informasi nasional dari ancaman siber.
- **Implementasi:**
 - Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga khusus yang menangani keamanan siber.
 - Penyusunan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk melindungi privasi masyarakat.
- **Tantangan:**
 - Meningkatnya serangan siber yang semakin canggih dan kompleks.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber.
- **Peluang:**
 - Pengembangan teknologi keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI).

- Peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan ancaman siber.

4. Kebijakan Pengembangan Ekosistem Startup Digital

- **Tujuan:** Mendorong pertumbuhan startup digital sebagai penggerak ekonomi digital.
- **Implementasi:**
 - Program 1.000 Startup Digital yang memberikan pendampingan dan pendanaan bagi startup baru.
 - Pembangunan pusat inovasi digital seperti Jakarta Digital Valley dan Bandung Techno Park.
- **Tantangan:**
 - Persaingan global yang ketat dalam industri startup.
 - Keterbatasan akses pendanaan dan mentor bagi startup di daerah.
- **Peluang:**
 - Peningkatan investasi dari venture capital dan investor asing.
 - Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk mendorong inovasi.

5. Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran dan Konten Digital

- **Tujuan:** Meningkatkan kualitas konten siaran dan digital yang edukatif, informatif, dan menghibur.
- **Implementasi:**
 - Regulasi tentang standar konten siaran dan digital melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
 - Program siaran edukatif seperti TV Edukasi dan konten digital berbasis kebudayaan.
- **Tantangan:**
 - Maraknya konten negatif dan hoaks di platform digital.

- Kurangnya pengawasan terhadap konten yang beredar di media sosial.
- **Peluang:**
 - Pemanfaatan teknologi AI untuk memfilter konten negatif.
 - Kolaborasi dengan platform media sosial untuk meningkatkan kualitas konten.

6. Kebijakan Pengembangan Smart City

- **Tujuan:** Mendorong pembangunan kota cerdas berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- **Implementasi:**
 - Program 100 Smart City yang melibatkan berbagai kota di Indonesia.
 - Pengembangan aplikasi smart city untuk layanan transportasi, kesehatan, dan lingkungan.
- **Tantangan:**
 - Keterbatasan anggaran dan infrastruktur di daerah.
 - Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi smart city.
- **Peluang:**
 - Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan big data untuk pengelolaan kota.
 - Kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembiayaan dan pengembangan teknologi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara..

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah "Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 adalah Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara 2025 - 2045:

”Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJPD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJPD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Progam yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2026 sebesar **Rp. 55.064.010.636,- (Lima puluh lima milyar enam puluh empat juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**

- c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :
- a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
 - b. Adanya perubahan nomenklatur subkegiatan yang ada di SIPD
 - c. Adanya pemetaan nomenklatur subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di Renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD
 - d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan

e. Adanya usulan Musrenbang Kecamatan

d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,29 Nilai				3,29 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,16 Nilai				3,16 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,45 Nilai				3,45 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,25 Nilai				3,25 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		3,25 Nilai				3,25 Nilai	
xxx	[URUSAN] X NON URUSAN								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75,00 Nilai	28.584.422.466			77,00 Nilai	38.348.117.716
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	500.000.000			10 Dokumen	550.000.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	4 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	81 Data	100.000.000	APBD		1 Data	150.000.000
2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	50.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	10.772.522.466			2 Laporan	11.106.217.716
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	1078 Orang/bulan	10.361.230.302	APBD		888 Orang/bulan	10.694.925.552
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	4 Laporan	411.292.164	APBD		4 Laporan	411.292.164
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	125.000.000			2 Dokumen	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan	125.000.000	APBD		2 Laporan	125.000.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	700.000.000			1 Dokumen	1.530.000.000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	-	-	APBD		3 Paket	580.000.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	43 Orang	700.000.000	APBD		80 Orang	950.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	800.000.000			5 Layanan	1.600.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	250.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong, Luar Daerah	68 Laporan	200.000.000	APBD		75 Laporan	400.000.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	350.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	-			100 Persen	5.800.000.000
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		6 Unit	2.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		7 Unit	1.300.000.000
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		1 Unit	300.000.000
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	-	-	APBD		50 Unit	2.000.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	15.005.100.000			12 Bulan	16.405.100.000
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	5.100.000	APBD		1 Laporan	5.100.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	1.000.000.000	APBD		1 Laporan	2.400.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3 Laporan	14.000.000.000	APBD	Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Ahli, Tenaga Tennis OPD, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, luran jaminan/asuransi, jasa pengelolaan sampah,	3 Laporan	14.000.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		28 Unit	681.800.000			100 Unit	1.231.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	20 Unit	381.800.000	APBD		22 Unit	381.800.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	-	-	APBD		1 Unit	550.000.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	8 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	2.155.000.000			100 Persen	13.805.357.333
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.155.000.000			840 Informasi dan Komunikasi Publik	13.805.357.333
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	100.000.000	APBD		5 Laporan	100.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Kutai Kartanegara	50 Komunitas	200.000.000	APBD		50 Komunitas	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, Dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Permohonan	200.000.000	APBD		5 Permohonan	300.000.000
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Tenggarong	1 Persentase	50.000.000	APBD		1 Persentase	75.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Tenggarong	10 Rekomendasi	1.000.000.000	APBD		12 Rekomendasi	1.900.000.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Kutai Kartanegara	2 Persentase	100.000.000	APBD		2 Persentase	200.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Tenggarong	1 Media	100.000.000	APBD		20 Media	10.530.357.333
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Tenggarong	850 Konten	85.000.000	APBD		850 Konten	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	150.000.000			16 Orang	200.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100 Persen	20.558.588.170			100 Persen	19.833.827.670
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD		58 OPD	20.558.588.170			58 OPD	19.833.827.670
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	6.807.278.842	APBD		56 Perangkat Daerah	4.487.278.842
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Tenggarong	2 Layanan	50.000.000	APBD		2 Layanan	75.000.000
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Tenggarong	1 Aplikasi	75.000.000	APBD		1 Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi Dan Fasilitas Promosi Literasi Spbedan/Atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	12.851.309.328	APBD	1. Mengakomodir Usulan Musrenbang 2. Persiapan Program Internet Desa Gratis"	56 Perangkat Daerah	14.121.548.828
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Spbe Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Serta Penyusunan Rencana Dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Tenggarong	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	450.000.000
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Tenggarong	1 Dokumen	275.000.000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.281.000.000				3.598.650.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100 Persen	2.281.000.000			100 Persen	3.598.650.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58 OPD	2.281.000.000			58 OPD	3.598.650.000
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Tenggarong	100%	150.000.000	APBD		100 Persen	250.000.000
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Tenggarong	100%	350.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Tenggarong	100%	1.381.000.000	APBD		100 Persen	2.698.650.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Tenggarong	170 Orang	300.000.000	APBD		130 Orang	200.000.000
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Tenggarong	100%	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.485.000.000				3.285.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		100 Persen	1.485.000.000			18,97 Persen	3.285.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		56 OPD	1.335.000.000			56 OPD	3.085.000.000
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tenggarong	12 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	1.100.000.000
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Tenggarong	2 Laporan	150.000.000	APBD	-	2 Laporan	700.000.000
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Tenggarong	56 Perangkat Daerah	985.000.000	APBD	Penyusunan Indeks KAMI, Belanja pengadaan Lisensi Antivirus, Lisensi Penetration Testing Keamanan Informasi & Perangkat Scanning Tool Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1.135.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	150.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Tenggarong	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	200.000.000
TOTAL					55.064.010.636	-			78.870.952.719

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.

4.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 merupakan pedoman

bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin

konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

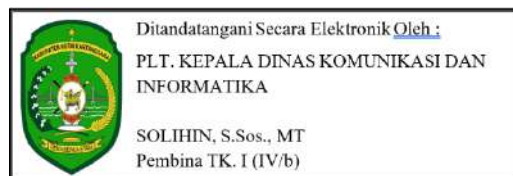
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan

perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tenggarong, Juni 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Telp (0541) 661350, Fax (0541) 664507
Website : diskominfo.kukarkab.go.id E-mail : diskominfo@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-192/DISKOMINFO/000.9.2/01/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keutusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dan menyusun serta membantu segala yang dibutuhkan baik data maupun informasi serta kebutuhan lainnya dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 02 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOLIHIN, S.Sos., MT
Pembina TK. I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	SOLIHIN, S.Sos. MT Nip. 19721029 199102 1 001	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ERY HARIYONO, SE, M.Si Nip. 19791029 201001 1 004	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Ketua
3.	SOFYAN AGUS, ST Nip. 19751217 200112 1 008	Kepala Bidang Informasi Kumunikasi Publik	Sekretaris
4.	H. ASDI, SE. MAP Nip. 19690313 200112 1 001	Kepala Bidang Statistik	Anggota
5.	ANGGORO PRASTOWO, SH Nip. 19780329 201001 1 001	Kepala Bidang Persandian	Anggota
6.	MAULIDA SAVITRI, SP Nip. 19790203 200801 2 025	Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	BUDIAN NOOR Nip. 19830815 201001 1 035	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOLIHIN, S.Sos., MT
Pembina TK. I (IV/b)